



LAMPUNG SAI

JANUARI 2021

EDISI 1



TOPIK UTAMA

- 17 OBH Lampung Laksanakan Penandatanganan Kontrak Pelaksanaan Bantuan Hukum
- Pelantikan dan Pengambilan Sumpah 23 Pejabat Administrasi
- Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan Semester II TA 2020



LIPUTAN KHUSUS

- Peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-71, Imigrasi Berbagi Imigrasi Peduli



Sambutan Kakanwil



Assalamualaikum Wr.Wb.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya serta kesehatan kepada kita, sehingga kita masih bisa terus bekerja, berkontribusi untuk negara dan memberikan pelayanan yang prima.

Pada bulan ini akhirnya kita dapat menyelesaikan edisi perdana buletin yang rencananya akan terbit setiap bulan. Buletin ini sebagai media informasi dan publikasi kegiatan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Lampung. Semoga dengan adanya buletin ini semua kegiatan kita dapat terpublikasi dan menjangkau khalayak luas.

Tentunya dalam mencegah penyebaran Covid-19, saya tidak berhenti mengingatkan untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas serta senantiasa berfikir positif.

Akhir kata Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum Wr. Wb.



DANAN PURNOMO

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM LAMPUNG





Dari Redaksi

PELINDUNG

Kepala Kantor Wilayah
DANAN PURNOMO

PENGARAH

Kepala Divisi Administrasi
IDA ASEP SOMARA

Kepala Divisi Yankum dan HAM
NUR ICHWAN

Kepala Divisi Keimigrasian
HASANUDIN

Kepala Divisi Pemasarakatan
FARID JUNAEDI

PENANGGUNGJAWAB

Kepala Bagian Program dan Humas
BASNAMARA

PEMIMPIN REDAKSI

Kasubag Humas RB & TI
ARLISA NOVIRIANTONO

EDITOR

ARLISA NOVIRIANTONO, DAMBA
WIRATAMA, REZA KHAIROL FITRA,
PIJAR ARINDA PUTRA, RIZQI DHITA
WARDHANIK, NABIL AN NAFIS

FOTOGRAFER, REDAKSI DAN BERITA

ARLISA NOVIRIANTONO, DAMBA
WIRATAMA, REZA KHAIROL FITRA,
PIJAR ARINDA PUTRA, RIZQI DHITA
WARDHANIK, NABIL AN NAFIS

LAYOUT & DESAIN GRAFIS

NABIL AN NAFIS

Assalamualaikum Wr Wb. Kami segenap redaksi E-Buletin Lampung Sai mengucapkan puji syukur kepada Tuhan YME atas rahmat dan karunianya edisi pertama ini dapat terbit. Selain itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah, Pejabat Tinggi Pratama dan semua pihak yang telah mendukung tim redaksi untuk berkarya serta terus-menerus melakukan inovasi.

E-Buletin ini memuat informasi seputar kegiatan dan kinerja dari Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Lampung dan seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan dan Imigrasi se Provinsi Lampung. Harapannya dengan adanya media ini dapat menjadi motivasi bagi kita untuk terus meningkatkan kinerja.

Pada edisi perdana ini kami sajikan liputan khusus mengenai rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke-71 mulai dari Bhakti Sosial hingga Pelaksanaan Upacaranya.

Tentunya masih banyak kekurangan dalam edisi perdana ini. Untuk itu kami senantiasa mengharap kritik, saran maupun masukan agar dapat terus meningkatkan kualitas maupun perbaikan pada buletin bulanan ini. Salam Pembaharuan! Lampung Sai Pasti Kece! Pasti WBK!





HAL. 5

KAKANWIL JADI PEMBICARA DALAM RAPAT PEMBAHASAN LINTAS LEMBAGA TERKAIT SOLUSI TERBAIK MENJAMIN LAPAS DAN RUTAN AMAN DARI COVID-19



HAL. 16

PERINGATAN HARI BHAKTI IMIGRASI KE-71 DAN DEKLARASI JANJI KINERJA TAHUN 2021



HAL. 19

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH 23 PEJABAT ADMINISTRASI JAJARAN KANWIL KEMENKUMHAM LAMPUNG



HAL. 23

KEGIATAN REKONSILIASI DATA LAPORAN KEUANGAN DAN BMN SEMESTER II TINGKAT WILAYAH TAHUN 2020

DAFTAR ISI



Kadiv Administrasi Beri Arahan Apel Perdana Tahun 2021 Pada Seluruh Jajaran Kanwil Lampung Secara Virtual..... 7

Wamen dan Plt. Sekjen Berikan Arahan dan Intruksi Menteri Secara Virtual..... 8

Kanwil Kumham Lampung Adakan Sharing Session Protokol Kesehatan dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Vaksinasi Covid-19 dengan Seluruh Satuan Kerja 10

Selenggarakan Rapat Pengarahan PIMTI, Kakanwil Arahkan Jajarannya untuk Menyusun Prioritas dalam Berkinerja..... 11

17 OBH Lampung Laksanakan Penandatanganan Kontrak Pelaksanaan Bantuan Hukum di Kanwil Lampung 12

Terkait dengan Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah dan Target Kinerja Tahun 2021, BPHN Gelar Rapat Koordinasi dengan Kanwil Seluruh Indonesia..... 13

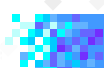
Memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke-71 Kanwil Lampung dan Seluruh Kantor Imigrasi Mengadakan Bhakti Sosial 14

Kanwil Kumham Lampung Ikuti Soft Entry Meeting BPK secara Virtual 18

Kanwil Lampung Gelar Rapat Persiapan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM TA 2021..... 21

Gelar Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan Semester II TA 2020 Jajaran Kantor Wilayah, Plt.Sekjen : Kami Optimis Raih Kembali WTP 22

Kegiatan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan BMN Semester II Tingkat Wilayah Tahun 2020 Berakhir..... 23



KAKANWIL JADI PEMBICARA DALAM RAPAT PEMBAHASAN LINTAS LEMBAGA TERKAIT SOLUSI TERBAIK MENJAMIN LAPAS DAN RUTAN AMAN DARI COVID-19



Jumat (18/12/2020) Di Ruang Abung Balai Keratun Sekretariat Provinsi Lampung dalam hal memenuhi undangan dari Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung: Danan Purnomo menghadiri undangan yang didampingi oleh Kepala Divisi Pemasarakatan:

Farid Junaedi dan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung: Syafar Pudji Rochmadi. Forum yang juga dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, serta Kepala Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi merupakan bentuk tindaklanjut masukan dari Kajati dan Kapolda tentang penempatan tahanan dan narapidana pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan yang aman dari Covid-19. Secara langsung Kapolda meminta kepada seluruh Forkopimda, bahwa kita sekarang sudah memasuki era kedua yaitu era pemulihan setelah melewati era pertama, yaitu era tanggap darurat. Beliau juga menjelaskan bahwa setelah memasuki era tanggap darurat tingkat kriminalitas menjadi naik dari era pemulihan sebelumnya. Hal ini membuat Ruang Tahanan di Kepolisian untuk penitipan tahanan baik dari kejaksaan maupun kepolisian sendiri menjadi over kapasitas. "mungkin lewat forum ini juga, kita mendapatkan solusi dari masalah yang ada"



tegas Purwadi Arianto. Melanjutkan diskusi, Kepala Kejaksaan Tinggi mempunyai 3 (tiga) hal permasalahan yang disampaikan, yaitu terkait dengan biaya rapid Test dan swab kepada tahanan, permasalahan penampungan tahanan, dan masalah perawatan tahanan suspek Covid-19. Dalam hal mendesak yaitu permasalahan dengan tahanan terkait dengan penitipan tahanan ke Rumah Tahanan. Dikarenakan di kejaksaan tidak memiliki ruang untuk tahanan. Namun terbentur dengan peraturan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait dengan penerimaan tahanan oleh Rumah Tahanan di masa pandemi Covid-19. Beliau juga menjelaskan dalam masalah pembiayaan perawatan tahanan yang memiliki suspek Covid-19, siapa yang harus menjadi penanggungjawab pembiayaannya. "mudah-mudahan dalam hari ini kita mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada" tutupnya.



Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Danan Purnomo menjelaskan bahwa penerapan surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan langkah Kanwil Kemenkumham Lampung agar situasi para tahanan dan narapidana yang berada di dalam lapas dan rutan aman dari paparan Covid-19. Menanggapi "Kita akan berikan solusi yang terbaik untuk kepentingan bersama, kami akan membuka ruang untuk para tahanan" jelasnya.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Lampung juga turut menanggapi dalam forum, beliau menjelaskan bahwa over kapasitas di lapas dan rutan merupakan kendala pula bagi Kan-

tor kemenkumham Lampung. Beberapa langkah juga telah dijalankan untuk mengurangi over kapasitas berupa pengiriman tahanan ke luar daerah lapas dan rutan di Lampung. Menanggapi permasalahan tahanan yang disampaikan oleh Kajati dan Kapolda, Beliau akan mencoba menerima tahanan dari kejaksaan yang sudah 20 hari (tahap pertama) serta telah melakukan rapid test dan dari kepolisian daerah Lampung dengan menyertakan keterangan bahwa ruang tahanan di kepolisian daerah sudah over kapasitas, untuk menjadi acuan laporan kepada pimpinan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penya-

kit Dinas Kesehatan Provinsi Lampung juga turut andil dalam forum diskusi ini, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung siap membantu untuk kegiatan Rapid Test pada para tahanan. Untuk selanjutnya untuk pengamanan ini kita memakai rapid tes antigen, dan kami dinas kesehatan siap mensupport ujar perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Mengakhiri forum, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan pernyataan bahwa terkait permasalahan tahanan akan dilakukan rapid tes antigen oleh dinas kesehatan provinsi Lampung.

KADIV ADMINISTRASI BERI ARAHAN APEL PERDANA TAHUN 2021 PADA SELURUH JAJARAN KANWIL LAMPUNG SECARA VIRTUAL



Mengawali kegiatan di Tahun 2021, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung menggelar Apel Pagi, Senin (04/01). Kegiatan apel yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah dipimpin secara langsung oleh Kepala Bagian Umum, Hadiyanto serta Kepala Divisi Administrasi, Ida Asep Somara sebagai Pembina apel. Kegiatan apel dilaksanakan secara serentak kepada seluruh pegawai Kantor Wilayah Lampung secara langsung dan juga secara virtual zoom. Para Unit Pelaksana Teknis jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung juga turut hadir dalam Apel yang digelar secara virtual zoom.

Dalam amanatnya, Kepala Divisi Administrasi menyampaikan beberapa poin penting untuk terlaksananya seluruh kegiatan di Tahun 2021 agar menjadi lebih baik. Mengajak seluruh jajaran untuk merefleksikan Kembali apa yang telah dilalu di tahun 2020, untuk menjadikan Kegiatan di Tahun

2021 menjadi lebih matang dalam persiapan dan pelaksanaannya dengan target-target yang telah kita sepakati Bersama.

Dengan Mengawali Kembali semua komitmen yang dibangun dan disepakati pada akhir tahun 2020 yang lalu, dari perjanjian kinerja, target kinerja, serta pencapaian target indikator kinerja utama pada masing-masing program termasuk didalamnya pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai peta jalan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Beliau juga mengingatkan kepada seluruh pegawai agar memperhatikan absensi dan jurnal harian, karena pemberian tunjangan kinerja melalui aplikasi SIMPEG dimulai sejak Bulan Januari Tahun 2021.

Selanjutnya Ida juga memberikan arahan kepada seluruh Calon Pegawai Negeri Salon Tahun 2019, karen hari

ini merupakan hari pertama untuk menjalankan tugas di masing-masing satker, dan meminta seluruh satker agar memberikan pengarahan serta segera menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Acara apel pagi perdana Tahun 2021 ini juga dirangkumkan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2019.

“Semoga pada kesempatan ini, mengawali tahun 2021, Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongannya, serta meridhoi segala usaha dan niat baik kita semua dalam mewujudkan Indonesia Maju.” Kata Ida.



WAMEN DAN PLT. SEKJEN BERIKAN ARAHAN DAN INTRUKSI MENTERI SECARA VIRTUAL



Senin (11/01/2021) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung mengikuti arahan dari Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia: Edward Omar Sharif Hiariej dan Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM: Andap Budi Revianto secara virtual.

Bertempat di Ruang Klinik Akuntabilitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Divisi Administrasi: Ida Asep Somara, Kepala Divisi Pemasarakatan: Farid Junaedi, Kepala Divisi Keimigrasian: Hasanudin, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM: Nur Ichwan, mengikuti kegiatan arahan dari

Wakil Menteri dan Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Membahas tentang Evaluasi Kinerja Tahun 2020, Alokasi Anggaran Tahun 2021 dan Rencana Kinerja Tahun 2021 serta Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Tahun 2021. Dalam pembukaan arahan, Andap Budi memberikan evaluasi capaian kinerja Tahun 2021 mengenai Realisasi Anggaran, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Specific Measurable Achievable Realistic dan Time Related (SMART), dan juga 9 Focus Target Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tahun Anggaran 2021.

Sekretaris Jenderal menjelaskan dalam 9 Focus Target Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tahun Anggaran 2021 yaitu Mendukung program



pemulihan ekonomi nasional khususnya peningkatan iklim investasi, pengembangan pariwisata, pengembangan koperasi dan UMKM, Meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta upaya pengendalian dan pencegahan Covid-19, Mendorong terwujudnya program prioritas Nasional pada Kemenkumham, Meningkatkan protokol kesehatan dalam pelayanan maupun perkantoran dan Optimalisasi Satgas Covid-19 di tiap Satuan Kerja, Inovasi dalam meningkatkan pelayanan, Selalu menjadikan standar nasional maupun internasional sebagai benchmark dalam peningkatan kinerja, Pengadaan Teknologi Informasi harus sesuai dengan kebutuhan dan kajian yang matang serta tidak terikat dengan vendor, Melakukan revaluasi terhadap DIPA TA 2021 yang sudah di sahkan dan dalam hal diperlukan agar mengajukan usulan revisi DIPA dan melakukan percepatan persiapan pelaksanaan program/kegiatan pengadaan barang/jasa, Mendukung dan menyukseskan program vaksin nasional.

Beliau juga menjelaskan terkait Instruksi Menteri Hukum

dan HAM Nomor M.HH-01.OT.04.01 Tentang Revitalisasi Fungsi Kantor Wilayah Sebagai Law And Human Rights Center yaitu Melakukan revitalisasi fungsi Kantor Wilayah sebagai Law and Human Rights Center, Melaksanakan fungsi Law and Human Rights Center pada Kanwil dalam penyelenggaraan pembentukan hukum, pelayanan hukum dan penegakan hukum di wilayah, Meningkatkan kompetensi dan peran sumber daya manusia Kantor Wilayah dalam pelaksanaan Law and Human Rights Center, Melakukan penataan ruangan dan menyiapkan sarana pendukung Law and Human Rights Center dengan cara mengoptimalkan sumber daya dan anggaran Kantor Wilayah, Berkonsultasi dengan seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kemenkumham untuk mendapatkan dukungan dan pembinaan dalam pelaksanaan instruksi ini, Berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk turut mendukung guna menyukseskan pelaksanaan instruksi ini.

Kemudian, diawali dengan mengabsen dan menyapa setiap Kakanwil, Edward Omar menegaskan, "Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yaitu

Mendagri, Menkumham, Menkominfo dan Pejabat-Pejabat setingkat Menteri lainnya mengenai pelarangan kegiatan FPI, penggunaan simbol dan atributnya. Sejak tanggal 21 juni 2019, Front Pembela Islam sebagai organisasi yang secara de yure telah bubar pada kenyataannya masih terus melakukan kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban dan bertentangan dengan hukum. Apabila ada terjadi pelanggaran, aparat penegak hukum akan menghentikan semua kegiatan yang diselenggarakan FPI. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh dan melaporkan apabila adanya pelanggaran tersebut. Tugas Kantor Wilayah harus memberikan pemahaman yang benar terkait pelaksanaan SKB tersebut, jaga netralitas, wajib berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum Dilkumjakpol." tegasnya.

Wakil Menteri: Edward Omar menyampaikan arahan tentang Surat Keputusan 6 (enam) Menteri tentang Pelarangan seluruh aktivitas atas nama FPI. Menurutnya Tugas Kantor Wilayah adalah memberikan pemahaman yang benar terkait kebijakan yang di ambil pemerintah tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam; jajaran Kantor Wilayah agar menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara dan mampu menjadi pemersatu bangsa yang Bhineka Tunggal Ika; jajaran Kantor Wilayah wajib berkoordinasi dengan instansi Dilkumjakpol, Pemda setempat dalam mensikapi dan melaksanakan SKB 6 Menteri ini.



KANWIL KUMHAM LAMPUNG ADAKAN SHARING SESSION PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DAN VAKSINASI COVID-19 DENGAN SELURUH SATUAN KERJA



Kamis (28/01/21), Kanwil Kumham Lampung adakan Sharing Session Protokol Kesehatan dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Vaksinasi Covid-19 dengan Seluruh Satuan Kerja secara virtual melalui Zoom Meeting.

Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Kakanwil yang diwakili Kabag Umum Hadiyanto. Disampaikan jika kondisi Covid-19 di Lampung telah memasuki zona merah hampir hitam. Hadiyanto juga menyampaikan untuk senantiasa

menjaga protokol Kesehatan "Tentunya kita yang sehat ini harus tetap menjaga 3 M dan lakukan pencegahan dengan deteksi dini dengan rapid maupun serologi" ujarnya. Kegiatan sesi berbagi ini juga dihadiri oleh Kasubbag Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga, Yulinar Trisia.

Dimoderatori oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya, M. Zuhri, yang mengawali sesi dengan menyampaikan UU Keekarantinaan Kesehatan sebagai pengantar, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi

Protokol Kesehatan dan Vaksin Covid-19 di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung oleh dr. Nathalia. Materi yang disampaikan meliputi situasi terkini Covid-19, pengenalan istilah baru, cara penularan, hingga cara pencegahan penularan baik secara pribadi maupun di lingkungan perkantoran.

Dokter juga menjelaskan apabila ada pegawai atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang terkonfirmasi positif Covid-19 untuk jangan panik dan segera melapor ke Satgas Covid-19 di kantor atau di masing-masing UPT serta melakukan koordinasi dengan Puskesmas atau Dinas Kesehatan terdekat.

Sosialisasi terkait vaksin juga tak luput disampaikan oleh dr. Nathalia. Adapun syarat bagi orang yang diperbolehkan mendapatkan vaksinasi adalah orang dewasa sehat dengan usia 18-59 tahun, telah menerima penjelasan dan menandatangani surat persetujuan serta bersedia mengikuti aturan dan jadwal imunisasi. Sedangkan orang yang tidak boleh menerima vaksinasi adalah penyintas Covid-19, wanita hamil atau menyusui, memiliki riwayat alergi vaksin, riwayat pembekuan darah yang tidak terkontrol, riwayat gangguan sistem imun dan memiliki penyakit kronis. Sesi tanya jawab menjadi penutup kegiatan kali ini

SELENGGARAKAN RAPAT PENGARAHAN PIMTI, KAKANWIL ARAHKAN JAJARANNYA UNTUK MENYUSUN PRIORITAS DALAM BERKINERJA



Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Anggaran, Pencapaian Target Kinerja, dan Peningkatan Pelayanan Publik di Tahun 2021 ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung menyelenggarakan Rapat Arahan Pimpinan Tinggi secara virtual pada Selasa (12/01/21) bertempat di Ruang Klinik Akuntabilitas Kinerja (KAK) dengan mengundang para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, para Kepala UPT dan seluruh pegawai di Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung.

Turut hadir dalam Rapat Pengarahan PIMTI, Kepala Kantor Wilayah: Danan Purnomo dan Kepala Divisi Administrasi: Ida Asep Somara secara virtual zoom. Di Ruang Klinik Akuntabilitas Kepala Divisi Masyarakat: Farid Junaedi, Kepala Divisi Keimigrasian: Hasanudin, dan Kepala Divisi Pelayanan

Hukum dan HAM: Nur Ichwan beserta Pejabat Administrator dan Pejabat pengawas. Kegiatan dilaksanakan dengan pemaparan dari masing-masing Kepala Divisi terkait rencana strategisnya dalam melaksanakan kinerjanya pada Tahun Anggaran 2021.

Dalam sambutan yang disampaikan secara virtual, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Danan Purnomo memaparkan tujuan dari penyelenggaraan Rapat Pengarahan ini, yakni:

- Menyusun Agenda Kerja Kantor Wilayah beserta jajaran dalam rangka mencapai Target Kinerja Tahun 2021
- Merancang kepanitiaan dg mempertimbangkan faktor-faktor yg mendukung pelaksanaan rencana kerja Tahun 2021.
- Mengenali berbagai pola komunikasi antar unit kerja serta hal-hal yg mendukung & menghambat upaya menjaga efektifitas komunikasi antar unit kerja dilingkungan Kantor

“Dalam melaksanakan program kerja yang telah dibuat, sebaiknya diprioritaskan target/sasaran kerja yang lebih penting (urgent), lebih mudah dan ringan untuk dikerjakan/dilaksanakan serta penyesuaian dengan situasi dan kondisi. Selalu lakukan evaluasi untuk mengukur tingkat kemajuan/keberhasilan strategi yang digunakan dalam melaksanakan tugas untuk mencapai target kinerja.” Ujarnya.

Wilayah.

- Merumuskan rencana dalam langkah-langkah konkrit untuk mewujudkan Sasaran yang ingin dicapai.

Danan mengarahkan kepada jajaran agar program kerja disusun berdasarkan prioritas dan tingkat kemudahannya untuk dicapai, dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang dihadapi, serta selalu melakukan evaluasi sebagai wujud pengendalian terhadap akuntabilitas kinerja.





17 OBH LAMPUNG LAKSANAKAN PENANDATANGANAN KONTRAK PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DI KANWIL LAMPUNG



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung melaksanakan Kegiatan Penandatanganan Kontrak Pelaksanaan Bantuan Hukum antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dengan pemberi Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2021. Rabu (20/01/2021).

Kepala Kantor Wilayah: Danan Purnomo mengikuti Kegiatan Penandatanganan Kontrak secara Virtual di Ruang Kepala Kantor Wilayah. Sedangkan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM: Nur Ichwan Bersama dengan Kepala Bagian Hukum: Ignatius Mangantar Tua S turut hadir sebagai saksi penandatanganan kontrak pelaksanaan bantuan hukum.

17 Orang dari Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi di Lampung terdiri dari:

1. YLBHI LBH Bandar Lampung,
2. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung,
3. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum SPSI Lampung,
4. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fiat Yustisia,
5. Lembaga Bantuan Hukum Negara Semesta (LBKNS),
6. Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH Unila),
7. Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad,
8. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Adin Jakarta Cabang Lampung,
9. Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Bersama Lampung,
10. Lembaga Advokasi Lampung,
11. LBH Adil Nusantara,
12. Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan,
13. Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tulang Bawang,
14. Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tanggamus,
15. Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pesisir Barat,
16. Lembaga Bantuan Hukum Sai Bumi Selatan,
17. dan Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum Lampung Lembaga Bantuan Hukum Tanjung Bintang.

Kegiatan penandatanganan kontrak berlangsung dengan pemberian sambutan oleh Kepala Kantor Wilayah. Beliau mengharapkan dengan adanya Penandatanganan Kontrak ini diharapkan Target Sasaran pelaksanaan Bantuan Hukum dapat terlaksana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta tepat sasaran. Dan rekan-rekan OBH segera optimalkan pelaksanaan kegiatan bantuan hukum. Acara dilanjutkan dengan Penandatanganan Kontrak dan diakhiri dengan foto Bersama.



TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN HUKUM DI WILAYAH DAN TARGET KINERJA TAHUN 2021, BPHN GELAR RAPAT KOORDINASI DENGAN KANWIL SELURUH INDONESIA



Persiapan Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2021 dan Pembahasan Target Kinerja dan Langkah-Langkah Strategis Peningkatan Kinerja Kantor Wilayah Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam rangka mewujudkan sinergi antara Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Kantor Wilayah untuk bersama-sama meningkatkan kinerja Tahun 2021 dilaksanakan secara Virtual Zoom Meeting. Kamis (21/01/2021).

Bertempat di Ruang Klinik Akuntabilitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM: Nur Ichwan, Kepala Bidang Hukum: Ignatius Mangantar Tua S, Kepala Bidang Pelayanan Hukum: Rugun Tresia OP, Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan

Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum: Susilowati, dan beserta 5 (lima) orang pegawai lainnya turut hadir mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi.

Pada awal kesempatan, Kepala BPHN: Benny Riyanto menyampaikan Perencanaan program di dalam manajemen organisasi merupakan hal yang penting dan merupakan arahan bapak menteri bahwa kita harus melaksanakan program secara serius di awal tahun. Anggaran BPHN lebih dari 50% turun ke kantor wilayah baik anggaran untuk bantuan hukum maupun kegiatan lainnya. Sehingga untuk tahun ini, penting bagi kita untuk mengawal kegiatan dengan baik dan bertanggungjawab.

Beliau juga menjelaskan 2 program prioritas nasional BPHN tahun ini, yaitu:

1. Verifikasi dan akreditasi bantuan hukum, kolaborasi kepanitiaan dari pusat

dan daerah agar supaya dilaksanakan secara bertanggungjawab.

2. Pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi yang diharapkan ada terobosan yang tidak mengganggu serapan anggaran mengingat masih dalam masa pandemi.

Lebih lanjut Kepala BPHN menjelaskan, Target kinerja kanwil yaitu: Analisis dan evaluasi peraturan daerah terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Verifikasi dan Akreditasi terhadap daerah yang selama ini belum memiliki Organisasi Bantuan Hukum (OBH), diharapkan Kanwil bisa melakukan pemerataan, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional terhadap anggota yang terintegrasi bisa diperluas. Saat ini BPHN sedang berupaya meningkatkan sarana dan prasarana JDIH.

Selanjutnya dengan Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN: Kartiko Nurintias, menyampaikan hal terkait dengan Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi agar segera ditindaklanjuti oleh Kantor Wilayah. Acara ditutup dengan sesi tanya jawab oleh Kantor Wilayah sebagai peserta rapat



MEMPERINGATI HARI BHAKTI IMIGRASI KE-71 KANWIL LAMPUNG DAN SELURUH KANTOR IMIGRASI LAMPUNG MENGADAKAN BHAKTI SOSIAL



Memperingati Hari Bhakti Imigrasi Ke-71, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung bersama seluruh UPT Keimigrasian telah menyiapkan serangkaian kegiatan yang mengusung tema "Imigrasi Berbagi Imigrasi Peduli".

Salah satu rangkaian kegiatan yang dilakukan hari Kamis (21/01/21) ini adalah Bhakti Sosial di Yayasan Yatim Piatu Panti Asuhan Sholawatul Falah, Padang Cermin Kabupaten Pesawaran oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung bersama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar

Lampung. Hadir dalam acara tersebut mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, Basnamara Kepala Bagian Program & Hubungan Masyarakat, Hadiyanto Kepala Bagian Umum beserta jajarannya dan mewakili Kepala Divisi Keimigrasian Lampung, Imam Santoso Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian beserta jajarannya serta Agung Prianto Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung beserta jajarannya.

Di hari sebelumnya, Rabu (20/01/21) pada pukul 09.00 WIB, bertempat di Panti Asuhan Harapan Bangsa Kalianda,

Lampung Selatan juga telah dilaksanakan kegiatan Bakti Sosial dan Doa Bersama oleh Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda. Pelaksanaan kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda dan diikuti oleh seluruh Pejabat Struktural, JFT dan JFU Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda.

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi juga telah menggelar bakti sosial dan doa bersama di Pondok Pesantren Shirul Huda, Wonogiri, Kotabumi, Lampung Utara, Pada hari Selasa (19/01/21).



Kegiatan doa bersama dilakukan sebagai wujud Ikh-tiar agar bangsa Indonesia dan dilindungi, diberikan kes-ehatan dan berharap Pandemi Covid-19 ini segera berlalu. Doa bersama juga ditujukan kepada saudara-saudara yang terkena musibah bencana yang terjadi akhir-akhir ini agar diberikan kesabaran, kekuatan dan keikhlasan serta dijauhkan dari bencana apapun.



Pada kegiatan bhakti sosial diserahkan sejumlah bantuan berupa paket sembako dan alat perlindungan diri. Bantu-an tersebut diharapkan dapat membantu dan memperlancar aktifitas anak-anak yatim-pia-tu dan santri dalam hal kebu-tuhan sehari-harinya terlebih pada Pandemi Covid-19 saat ini.

PERINGATAN HARI BHAKTI IMIGRASI KE-71 DAN DEKLARASI JANJI KINERJA TAHUN 2021



Memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke-71 pada hari ini, Selasa (26/01/21) bertempat di Aula Kantor Imigrasi TPI Kelas I Bandar Lampung diadakan Upacara peringatan dan pemotongan tumpeng secara virtual.

Hadir pada kegiatan tersebut Danan Purnomo, S.H., M.Si Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Drs. Hasanudin, M.M Kepala Divisi Keimigrasian, Basnamara, S.H., M.H. Kepala Bagian Program & Hubungan Masyarakat, Hadiyanto, S.H, M.H. Kepala Bagian Umum, Imam Santoso Kepala Bidang Perizinan & Informasi Keimigrasian, Agung Prianto Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung beserta jajarannya.

Acara dimulai dengan upacara peringatan secara virtual dengan Prof. Yasonna H Laoly Menteri Hukum dan HAM RI bertindak sebagai Inspektur



Upacara. Dalam sambutannya Yasonna H. Laoly menghimbau kepada seluruh insan imigrasi di mana pun berada, untuk bersama menyelaraskan pola pikir, dan mengubah etos kerja menjadi lebih baik lagi serta memiliki Fleksibilitas, kecepatan, dan ketepatan dalam bekerja. Sesuai tema yang digaungkan dalam peringatan HBI kali ini, yakni "Imigrasi Bersatu dalam Jarak, Menuju Indonesia Maju", Maju merupakan sebuah semangat yang harus diejawantahkan dalam

sebuah kebijakan yang dapat dilaksanakan pada seluruh lapisan birokrasi, serta dalam tataran unit eselon I khususnya Ditjen Imigrasi.

Indonesia Maju merupakan pondasi kinerja yang mengharuskan Ditjen Imigrasi dan seluruh insan imigrasi untuk dapat mewujudkan empat hal, yaitu mewujudkan kepastian dalam menghadirkan layanan serta pemanfaatan inovasi dalam pelaksanaan fungsi layanan keimigrasian, kemudian



mewujudkan kepastian hukum dalam penegakan hukum keimigrasian, mewujudkan stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan keimigrasian, dan terakhir menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui reformasi birokrasi dan penguatan SDM yang mumpuni. Peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-71 dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng.



Acara dilanjutkan dengan deklarasi janji kinerja tahun 2021 yang dilaksanakan serentak seluruh Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI secara virtual. Sebagai apresiasi, penghargaan diberikan kepada instansi terkait yang turut membantu mengsucceskan kinerja Kementerian Hukum dan HAM tahun kinerja 2020. Dalam rangkaian acara ini di telah ditanda tangani prasasti peresmian Gedung Kantor Imigrasi baru dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dan Kantor Imigrasi kelas II TPI tembilahan. Acara ditutup dengan pembukaan pencahangan zona integritas tahun 2021.



KANWIL KUMHAM LAMPUNG IKUTI VIRTUAL MEETING SOFT ENTRY MEETING BPK SECARA VIRTUAL



Senin (25/01), Kemenkumham bersiap mendapat pemeriksaan atas laporan keuangan TA 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bentuk dari akuntabilitas kinerja. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan Soft Entry Meeting BPK yang dilaksanakan secara virtual dari Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI. Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Pimpinan Tinggi Pratama dan para staf Keuangan dan BMN mengikuti acara tersebut.

Kegiatan dibuka oleh Bapak Andap Budhi Revianto selaku Inspektoral Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam pembukaannya beliau menyambut tim BPK dan mengharapkan seluruh satuan kerja mendukung proses pemeriksaan oleh BPK dan berharap agar di tahun 2020 Kementerian Hukum dan Ham memperoleh WTP tetap dengan opini yang sama. Kemudian beliau berharap agar kegiatan

tan di tengah pandemi berjalan aman dan tetap produktif.

Selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Novy G.A. Pelenkahu selaku penanggung jawab tim pemeriksa dari BPK menyampaikan mengenai Jenis pemeriksaan BPK ada tiga, yaitu: keuangan, kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Yang pertama, pemeriksaan bertujuan menilai kewajaran penyajian LK Kemenkumham Thun 2020 dengan memperhatikan: Kesesuaian LK dengan SAP, kecukupan pengungkapan LK, Kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Selanjutnya lingkup dan sasaran pemeriksaan dilakukan atas akun-akun neraca pada laporan keuangan Kemenkumham Tahun 2020 per posisi 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran (TA) 2020 beserta Catatan Atas Laporan Keuangan. Terakhir, Beliau menekankan bahwa Pemeriksaan juga dilakukan atas akun-akun laporan perubahan ekuitas per 31 Desember 2020 dan laporan operasional selama periode TA 2020. Serta meliputi realisasi refofussing kegiatan dan realokasi anggaran serta alokasi tambahan anggaran Kemenkumham dalam rangka penanganan pandemic covid-19.

Menurut Novy, pemeriksa harus membangun komunikasi yang efisien dan efektif di seluruh proses pemeriksaan. Supaya proses pemeriksaan berjalan dengan lancar dan hasil pemeriksaan dapat dimengerti dan ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggungjawab dan/ atau pemangku kepentingan. Untuk itu, dia berharap stakeholder yang diperiksa nantinya bisa menjalin komunikasi dengan baik.





PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH 23 PEJABAT ADMINISTRASI JAJARAN KANWIL LAMPUNG



Selasa (26/01/2021), bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Danan Purnomo, selaku Kepala Kantor Wilayah melantik dan mengambil sumpah 23 orang Pejabat Administrasi Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung.

Pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-75.KP.03.03 TAHUN 2020 Tanggal 23 Desember 2020, W9.311.KP.03.03 TAHUN 2021 Tanggal 21 Januari 2021, M.HH-16.KP.03.03 TAHUN 2021 Tanggal 22 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, menetapkan:

1. Rugun Tresia Oktavianti Pakpahan, S.H., M.H. sebagai Kepala Bidang Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung
2. Ignatius Mangantar Tua Silalahi, S.H., M.H. sebagai Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung
3. Doni Arianto Raharjo, S.H., M.H. sebagai Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung
4. Susilowati, S.Sos. sebagai Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung
5. Ferie Irza Irawan, S.Si., M.H. sebagai Kepala Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung
6. Arlisa Noviriantono, S.H., M.H. sebagai Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung
7. Hidayatullah Islamy, S.H. sebagai Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung
8. Masriakromi, S.H., M.H. sebagai Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung
9. Adil Jaya Negara, S.H., M.H. sebagai Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung





dan Hak Asasi Manusia Lampung

10. Raden Ayu Fatimah, S.H., M.Si. sebagai Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung
11. Bachtiar, S.H., M.H. sebagai Kepala Subbidang Penindakan Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung
12. Indra Maulana Dimiyati, A.md.Im., S.H., M.H. sebagai Kepala Seksi Intelijen Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung
13. Antares Fibriano, S.H. sebagai Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung
14. Evi Risdianti, S.H., M.H. sebagai Kepala Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung
15. Faldo Ramadhan, A.Md.Im., S.H. sebagai Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung
16. Auda Irwanda Putra, S.H.I. sebagai Kepala Sub Bagian Umum pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung

17. Yulianto, S.H. sebagai Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih
18. Achmad Walid, A.Md.I.P., S.H., M.H. sebagai Kepala Satuan Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih
19. Lukas Andriadi, A.Md.I.P., S.H. sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung
20. Silvia Erafitri, A.Md.I.P., S.H. sebagai Kepala Seksi Registrasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung
21. Pebri Sadam, A.Md.P., S.H. sebagai Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung
22. Mertza Heri Winata, S.E. sebagai Kepala Sub Seksi Pengamanan dan Pengelolaan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Bandar Lampung
23. Eko Budiharto, S.H. sebagai Kepala Sub Seksi Sarana Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda

Dalam sambutannya setelah melantik dan

“Teruskan berkarya, junjung tinggi kejujuran untuk membangun Kementerian Hukum dan HAM yang berwibawa.” “Mari bersama-sama kita tunjukkan karya yang nyata demi kejayaan bangsa. Jangan pernah surut untuk memberikan yang terbaik. Tetaplah memiliki semangat untuk bekerja dengan penuh dedikasi, integritas, dan keyakinan untuk meraih kemuliaan dengan Tata Nilai PASTI.” tegasnya

mengambil sumpah, Danan menyampaikan kepada para pejabat yang baru dilantik, bahwa mutasi dan promosi jabatan adalah hal yang biasa dilakukan oleh satu organisasi dengan tujuan meningkatkan pembinaan karir pegawai dan merupakan dinamika organisasi pemerintahan yang senantiasa menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan keadaan, oleh karena itu organisasi yang baik harus mampu memenuhi dan menjawab segenap tuntutan tugas yang berorientasi pada peningkatan pelayanan pada masyarakat.

KANWIL LAMPUNG GELAR RAPAT PERSIAPAN DEKLARASI JANJI KINERJA DAN PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM TA 2021

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung menggelar Rapat Persiapan Pelaksanaan Penandatanganan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun Anggaran 2021. Rabu (27/01/2021).

Kegiatan Rapat yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah: Danan Purnomo, Kepala Divisi Administrasi: Ida Asep Somara (secara virtual), Kepala Divisi Masyarakat: Farid Junardi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM: Nur Ichwan, beserta Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis se-Bandar Lampung jajaran Kantor Wilayah Lampung.

Dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah sekaligus menyampaikan bahwa Deklarasi

Janji Kinerja Dan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan. Tentunya untuk mewujudkan hal tersebut sebagai langkah awal pencanangan tersebut harus berpedoman pada kaidah-kaidah standar dengan melakukan Rapat Kerja Kegiatan, Menyampaikan Undangan baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual yang meliputi unsur Pimpinan Pusat, Forkopimda serta Unit Pelaksana Teknis.

Dilanjutkan Kepala Divisi Administrasi juga menjelaskan secara rinci rancangan susunan kepanitiaan pelaksanaan Penandatanganan Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2021 dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun Anggaran 2021. Ida menghimbau kepada Panitia untuk segera melaku-



kukan koordinasi kepada pihak eksternal.

Dilanjutkan himbauan dari Kepala Divisi Masyarakat juga kepada Kepala Satuan Kerja untuk segera membuat konsep Kegiatan Pelaksanaan Penandatanganan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (Zi) Tahun 2021 untuk dilaksanakan dimasing – masing Satuan Kerja, memprioritas Laporan Pelayanan Berbasis HAM dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk meminimalisir kesalahan seperti keterlambatan upload atau tidak adanya laporan maupun dokumentasi, dan membuat Tim Sosialisasi guna memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada media maupun masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan saran dari peserta rapat terkait pelaksanaan dan harapannya kepada Panitia untuk dapat saling mendukung, bekerjasama, dan bersinergi dalam mempersiapkan segala Rangkaian Kegiatan dengan sebaik mungkin.



GELAR REKONSILIASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA LAPORAN KEUANGAN SEMESTER II TA 2020 JAJARAN KANTOR WILAYAH, PLT.SEKJEN : KAMI OPTIMIS RAIH KEMBALI WTP

Pembukaan Rekon Data Laporan Keuangan Semester II Tahun 2020 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara resmi dibuka, Rabu (03/02/2021). Kegiatan Rekon Nasional dibuka secara langsung oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI: Andap Budhi Revianto. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka pemutakhiran data laporan keuangan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Semester II Tahun Anggaran 2020 yang diharapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta menghasilkan data muktakhir yang akurat dan akuntabel.

Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Kantor Wilayah Danan Purnomo Bersama dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan Faried Junaidi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Nur Ichwan, Kepala Bagian Program dan Humas Basnamara, Kepala Bagian Umum Hadiyanto mengikuti secara Virtual Zoom Meeting di Ruang Kepala Kantor Wilayah.

Dalam penjelasannya Andap Budhi Revianto menerangkan tentang masalah signifikan yang menjadi atensi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terkait dengan belanja, aset lancar serta aset tetap. Hal ini dibuktikan dengan masih ada beberapa yang belum ditin-



daklanjuti dari rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK RI. Beliau mengharapkan agar kesesuaian data laporan keuangan antara aspek BMN dan aspek keuangan diberbagai jenjang, terselesaikannya permasalahan data laporan keuangan, laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan yang berlaku, serta tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Kegiatan Rekon Nasional juga mendapatkan pendampingan

dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan pendamping dari Unit Eselon I masing-masing



KEGIATAN REKONSILIASI DATA LAPORAN KEUANGAN DAN BMN SEMESTER II TINGKAT WILAYAH TAHUN 2020 BERAKHIR

Kegiatan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Semester II Tingkat Wilayah Tahun 2020 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung telah berakhir. Dengan memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dengan memperhatikan aspek relevan, andal, dapat dibandingkan dan mudah dipahami sehingga dapat Menyusun laporan keuangan yang akurat, transparan, akuntabel dan tepat waktu.

Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung ini mendatangkan Operator Aplikasi Saiba dan Operator Aplikasi BMN dari masing-masing unit Satuan Kerja jajaran Kantor Wilayah Lampung sebanyak 68 orang.

Kepala Bagian Umum: Hadiyanto sebagai Ketua Penyelenggara sekaligus mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menutup Kegiatan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Semester II Tingkat Wilayah Tahun 2020.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN: Arya Dwi Jayanti memberikan laporan Ketua Penyelenggara. Secara umum, Arya menjelaskan bahwa Kegiatan Rekonsiliasi berjalan dengan baik, namun ada beberapa catatan: Untuk Rekonsiliasi Saiba masih ditemukan beberapa kesalahan dalam pencatatan pengaku-



an nilai pendapatan maupun pencatatan jurnal pengakuan utang, serta Untuk Rekonsiliasi BMN ditemukan beberapa kesalahan pencatatan kode akun barang, serta Satuan Kerja terdapat aset yang dihentikan namun belum diusulkan penghapusan

Terlepas dari itu, Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN memberikan ucapan terimakasih kepada seluruh peserta atas dedikasinya selama mengikuti kegiatan Rekonsiliasi serta mengucapkan permohonan maaf apabila dalam kesalahan dan kekurangan.

Selanjutnya Kepala Bagian Umum menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber dan segenap tim pendamping dari unit eselon 1, para peserta dan panitia. Menutup secara resmi sebagai perwakilan Kepala Kantor Wilayah beliau memberikan nasehat kepada peserta bahwa kalian adalah pahlawan sesungguhnya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



PROTOKOL KESEHATAN NEW NORMAL

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020, dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19.

JAGA JARAK

Tetap memperhatikan jaga jarak (physical distancing) minimal 1 meter saat berhadapan dengan orang lain.



GUNAKAN MASKER

Saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja. HINDARI tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut.

CUCI TANGAN

Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer.



AYO! PAKAI MASKER

KENAKAN MASKER ANDA DEMI KEBAIKAN KITA BERSAMA

CEGAH PENYEBARAN COVID-19 DIMULAI DARI DIRI SENDIRI



BANTU KAMI MEMBENAHAI LAYANAN
DENGAN BERPARTISIPASI DALAM
SURVEI BERIKUT

Gunakan smartphone anda untuk memindai (scan) QR-Code berikut*



Atau klik tautan (link) di bawah
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
<http://bit.ly/borangsumemas>

Gunakan smartphone anda untuk memindai (scan) QR-Code berikut*



Atau klik tautan (link) di bawah
SURVEI KUALITAS PELAYANAN
<https://survei.balitbangham.go.id/ly/ROCP7k6H>